



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 35.1 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian reformasi birokrasi serta dampak positif terhadap hasil pembangunan, perlu dilakukan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pencapaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta serta sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah, meliputi :
 - a. Bab II pada Tabel 2.1 Trend Pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022;

b. Bab II . . .

- b. Bab II pada Tabel 2.2 Target Pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi s.d Tahun 2026;
 - c. Bab III pada Tabel 3.2 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Surakarta;
 - d. Bab III pada Tabel 3.3 Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Surakarta;
 - e. Bab III pada Tabel 3.4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2023–2026;
 - f. Bab III pada Tabel 3.6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024;
 - g. Bab III pada Tabel 3.7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025;
 - h. Bab III pada Tabel 3.8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2026;
 - i. Bab III pada Tabel 3.11 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta;
 - j. Bab III pada Tabel 3.12 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Digitalisasi Pemerintahan-Stunting Kota Surakarta.
2. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1
TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2021-2026

Tabel 2.1 Trend Pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023

No	Indikator	Satuan	Skala	Realisasi				Sumber Data
				2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks RB	Indeks	0-100	68,36	68,9	70,78	74,70	Kemen PANRB
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	0-100	n/a	87,14	86,64	86,64*	SPI eksternal oleh KPK
3.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	1-10	n/a	7,44	8,39	8,28	Diskominfo SP Kota Surakarta
4.	Maturitas Kelembagaan	Skor	0-55	37,14	41,8	45	50,63	Prov. Jawa Tengah
5.	Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Nilai	0-100	n/a	n/a	48	98,5	Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka	0-100	9,03	9,4	8,84	8,44	BPS
7.	Peningkatan Realisasi Investasi	%	0-100	47,3	31,75	260,03	1,49	DPMPSTP
8.	Pengendalian Tingkat Inflasi	Nilai	0-100	1,38	2,58	7,03	3,20	BPS
9.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Skor	0-100	0	48,20	60,3	68,32	LKPP
10.	Persentase Penyederhanaan Struktur Birokrasi	%	0-100	n/a	97,69	97,69**	97,69**	Kemen PANRB
11.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Skor	0-5	n/a	n/a	1	2	Kemen PANRB
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1-5	3,54	2,75	3,73	3,74	Kemen PANRB
13.	Nilai SAKIP	Skor	0-100	69	69,26	70,34	70,81	Kemen PANRB
14.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Skor	0-3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Kemen PANRB
15.	Tingkat Maturitas SPIP	Skor	0-5	3	3	3	3,267	BPKP
16.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang	Skor	1-5	n/a	n/a	n/a	5	Kemen PANRB

No	Indikator	Satuan	Skala	Realisasi				Sumber Data
				2020	2021	2022	2023	
	Sudah Diselesaikan							
17.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	0-100	n/a	84,52	81,99	83,75	Komisi Pemberantasan Korupsi
18.	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	0-100	n/a	83,15	83,15**	35,55	LAN RI
19.	Indeks Reformasi Hukum	Skor	0-100	n/a	n/a	54,95	77,81	Kemenkumham
20.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor	0-100	n/a	n/a	n/a	85,71	ANRI
21.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Skor	1-5	n/a	n/a	2,28	2,15	BPS
22.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	0-100	0	48,20	60,30	68,32	LKPP
23.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKP
24.	Indeks Sistem Merit	Skor	0-400	253,5	253,5	267	308,5	KASN
25.	Indeks Pelayanan Publik	Skor	0-5	4,34	4,59	4,66	4,52	Kemen PANRB
26.	Indeks BerAKHLAK	Indeks	0-100	n/a	n/a	63,5	62,3	Kemen PANRB
27.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Skor	0-100	n/a	59,85	94,64	96,91	ORI
28.	Nilai SKM	Nilai	0-100	83,88	85,55	87,45	89,11	Kemen PANRB

* nilai tahun 2022

**nilai tahun 2021

Sumber: Hasil Evaluasi Tahun 2023

Tabel 2.2 Target Pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi s.d Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Skala	Baseline 2022	Target				Capaian (%)		Sumber Data
					2023	2024	2025	2026	2024	2026	
Dampak: Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tngguh, gesit, kreatif dan sejahtera											
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	0-100	86,64	87	87,3	87,5	88	87,30	88	SPI eksternal oleh KPK
2.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	1-10	8,39	8,21	8,58	8,85	9,12	85,80	91,20	Diskominfo SP
3.	Maturitas Kelembagaan	Nilai	0-55	45	38	40	44	46	72,73	83,64	Prov. Jawa Tengah
4.	Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Nilai	0-100	48	48	50	50	52	50,00	52,00	Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tujuan: Birokrasi Pemerintah yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik											
5.	Indeks RB	Indeks	0-100	70,78	75	80	85	86	80,00	86,00	Kemen PANRB
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel											
6.	Persentase Penyederhanaan Struktur Birokrasi	%	0-100	97,69*	100	100	100	100	100,00	100,00	Kemen PANRB
7.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Skor	0-5	1	3	4	5	5	80,00	100,00	Kemen PANRB
8.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1-5	3,73	3,6	3,7	3,8	4	74,00	80,00	Kemen PANRB

No	Indikator	Satuan	Skala	Baseline 2022	Target				Capaian (%)		Sumber Data
					2023	2024	2025	2026	2024	2026	
9.	Nilai SAKIP	Skor	0-100	70,34	80	85	90	95	85,00	95,00	Kemen PANRB
10.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Skor	0-3,5	1,5	0,75	0,75	0,75	1,5	21,43	42,86	Kemen PANRB
11.	Tingkat Maturitas SPIP	Skor	0-5	3,008	2,8	3	3,2	3,4	60,00	68,00	BPKP
12.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	SKor	1-5	n/a	5	5	5	5	100,00	100,00	Kemen PANRB
13.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	0-100	81,99	83,75	83,9	84,00	84,20	83,90	84,20	KPK
14.	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	0-100	83,15*	55	60	65	70	60,00	70,00	LAN RI
15.	Indeks Reformasi Hukum	Skor	0-100	55,95	60	70	80	85	70,00	85,00	Kemenkumham
16.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor	0-100	n/a	81,73	86,5	87,50	90,00	86,50	90,00	ANRI
17.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Skor	1-5	2,28	2,15	2,5	2,70	3,00	50,00	60,00	BPS
18.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Skor	0-100	60,30	65	67,5	70	75	67,50	75,00	LKPP
19.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	BPK

No	Indikator	Satuan	Skala	Baseline 2022	Target				Capaian (%)		Sumber Data
					2023	2024	2025	2026	2024	2026	
20.	Tingkat tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	0-100	98,87	95	96	97,00	97,50	96,00	97,50	BPK
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional											
21.	Sistem Merit	Skor	0-400	267	304	324	325	327	81,00	81,75	Komisi ASN
22.	Indeks BerAKHLAK	Indeks	0-100	63,5	65	67	69	71	67,00	71,00	Kemen PANRB
23.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	0-5	4,66	4,66	4,68	4,70	4,72	93,60	94,40	Kemen PANRB
24.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Skor	0-100	94,64	94,64	94,66	94,68	94,70	94,66	94,70	ORI
25.	Nilai SKM	Nilai	0-100	87,45	85,00	87,00	88,00	89,00	87,00	89,00	Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta

*data terakhir tahun 2021

Sumber: Hasil Evaluasi Tahun 2023

**Tabel 3.2 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi
General Pemerintah Kota Surakarta**

Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	10	10	10	30
Pengelolaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	10	30
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	9	9	28
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	7	10	27
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	6	8	24
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	3	10	23
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	5	5	20
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	3	5	18
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	3	5	18
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	2	4	16
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	2	4	16
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	3	3	16
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	3	3	16
Pelaksanaan Arsip Digital	10	3	3	16
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	1	1	12
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	10	10	30
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	10	10	30
Penguatan Sistem Merit	10	3	7	20

Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
Penataan Jabatan Fungsional	10	5	6	21
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	5	6	21
Pelaksanaan Core Values ASN	10	2	5	17

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.3 Indikator dan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Surakarta

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target			
				2023	2024	2025	2026
Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel							
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Struktur Birokrasi	%	97,69	100	100	100	100
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Skor	1	3	4	5	5
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,73	3,6	3,7	3,8	4
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Skor	70,34	80	85	90	95
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,73	3,6	3,7	3,8	4
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Skor	1,5	0,75	0,75	0,75	1,5

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target			
				2023	2024	2025	2026
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,008	2,8	3	3,2	3,4
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Skor	0	5	5	5	5
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	81,99	83,75	83,9	84	84,2
Pengelolaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	83,15*	55	60	65	70
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Skor	55,95	60	70	80	85
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor	0	81,73	86,5	87,5	90
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Skor	2,28	2,15	2,5	2,7	3
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Skor	60,3	65	70	72,75	75

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target			
				2023	2024	2025	2026
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Tingkat tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	98,87	95	96	97	97,5
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional							
1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Sistem Merit	Skor	267	304,0	324	325	327
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Indeks	63,5	65,0	67	69	71
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66	4,66	4,68	4,7	4,72
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Skor	94,64	94,6	94,66	94,68	94,7
	Nilai SKM	Nilai	87,45	85,0	87	88	89

*) perhitungan mandiri

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024–2026

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
88.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincuh, Kolaboratif, dan Akuntabel																
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Struktur Birokrasi*	100	100	100	Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	Dokumen	Jumlah Perwadi Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	0	Rp0	1	Rp200.000.000	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	1	Rp150.000.000	1	Rp150.000.000	1	Rp150.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi*	4	5	5	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi squad model) pada Instansi Pemerintah	Penyusunan kebijakan Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah pencetakan SK Ketua Tim Kerja Perangkat Daerah	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Penyusunan alur pembentukan POKJA atau Tim Kerja	Dokumen	Jumlah dokumen alur pembentukan POKJA atau Tim Kerja	1	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
					Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	Pencetakan Manajemen Talenta ASN	Persen	persentase ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan kinerja dan kompetensi	80	Rp0	85	Rp0	90	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
					Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Evaluasi Implementasi Jadwal Kerja Khusus (Shift)	kegiatan	Jumlah kegiatan terkait evaluasi implementasi jadwal kerja khusus/shift	1	Rp2.400.000	0	Rp0	0	Rp0	BKPSDM	Perangkat Daerah Tertantu
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Manev. Efektivitas Tim Kerja	kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi efektivitas Tim Kerja	0	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM dan Bagian Organisasi	BKPSDM dan Bagian Organisasi
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,7	3,8	4	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Review Arsitektur SPBE	Dokumen	jumlah dokumen review SPBE	2	Rp0	2	Rp3.000.000	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
					Reviu Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Reviu Peraturan Wali Kota tentang SPBE	2	Rp0	2	Rp3.000.000	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP	
					Reviu kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	1	Rp0	1	Rp3.000.000	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
						Reviu kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	1	Rp0	1	Rp3.000.000	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp5.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan unsur tata kelola SPBE	3	Rp0	3	Rp5.000.000	2	Rp1.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Pelaksanaan audit TIK	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit TIK	2	Rp0	1	Rp2.000.000	1	Rp2.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Manajemen SPBE	2	Rp0	2	Rp2.000.000	2	Rp5.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	dokumen	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	1	Rp0	1	Rp75.000.000	1	Rp75.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	4	Rp0	4	Rp10.000.000	4	Rp10.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	85	90	95		Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP	dokumen	Jumlah Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP yang tersusun	1	Rp0	1	Rp1.000.000	1	Rp1.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
						Penyelenggaraan Workshop eSAKIP	Orang	Jumlah Peserta Workshop yang memahami eSAKIP	100	Rp24.700.000	100	Rp28.000.000	100	Rp28.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Laporan	Laporan Capaian kinerja Triwulanan Perangkat Daerah yang disusun	4	Rp10.000.000	4	Rp10.000.000	4	Rp10.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,7	3,8	4		Penyusunan SOP Layanan MPP Digital	Dokumen	Jumlah SOP yang disusun	2	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
						Tersedianya MPP digital	Dokumen	Jumlah Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	15	Rp0	24	Rp0	28	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN						PERANGKAT DAERAH	
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP Digital	Dokumen	Jumlah laporan monev penyelenggaraan MPP Digital	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	DPMPTSP	DPMPTSP
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,75	0,75	1,5	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan evaluasi Pembangunan ZI WBK/WBBM	10	Rp40.050.000	11	Rp78.000.000	12	Rp80.000.000	Inspektorat	Perangkat Daerah Dalam Pembangunan Zona Integritas
						Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	1	Rp500.000	1	Rp550.000	1	Rp600.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3,2	3,4	Terlaksananya penguatan SPIP	Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	35	Rp30.000.000	35	Rp45.000.000	35	Rp50.000.000	Inspektorat	Inspektorat
						* Melibatkan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko dan menckankan kepada Prangkat Daerah dalam materi sosialisasi bawa Pejabat dalam suatu Perangkat Daerah adalah Unit Pemilik Risiko sehingga harus ikut andil dalam Identifikasi Risiko, FGD dan penyusunan RTP serta lebih memperhatikan risiko Fraud dalam penyusunannya * Penyusunan Risiko berlasar Critical Success Factor dan difasilitasi dalam sistem SARKEMIS * Membuat Arah Kebijakan supaya Perangkat Daerah lebih terbuka terhadap kemungkinan risiko fraud dan tagig fraud akan dimulai saat ideutifikasi risiko sampai RTP * Penanganan realisasi capaian Sakip dibawah 70% wajib membuat Keterjadian Risiko (AB3) dan mencatatnya sebagai risiko di tahun berikutnya	Laporan	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Manajemen Risiko	1	Rp105.200.000	2	Rp125.000.000	2	Rp135.000.000	Bagian Adm. Pemb. Setda	Bagian Adm. Pemb. Setda

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5	5	5	Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	OPD	Jumlah OPD/Unit yang menyelesaikan aduan yang masuk	484	Rp0	484	Rp110.610.000	484	Rp110.610.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
					Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aduan	Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aduan	orang	Jumlah Peserta Bimtek yang memahami peran dan fungsi sbg pengelola aduan	125	Rp41.037.500	125	Rp33.150.000	125	Rp50.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
					Review Perwali No 8.1 tahun 2023 tentang Ulas	Review Perwali No 8.1 tahun 2023 tentang Ulas	Dokumen	jumlah Perwali Pengelolaan Aduan Masyarakat yang lebih luas pengaturannya yang diterbitkan	0	Rp0	0	Rp1.500.000	1	Rp1.500.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
					Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aduan	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aduan	Laporan	Jumlah laporan hasil pengelola aduan lebih baik	4	Rp0	4	Rp57.960.000	4	Rp57.960.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
					koordinasi dan konsultasi dengan kementerian rb dan kemenkominfo	koordinasi dan konsultasi dengan kementerian rb dan kemenkominfo	Dokumen	jumlah dokumen hasil sinkronisasi aplikasi Ulas dan SIMN Lapor	0	Rp0	1	Rp15.000.000	1	Rp15.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Melakukan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus	12	Rp88.500.000	12	Rp95.000.000	12	Rp100.000.000	Inspektorat	Inspektorat
					Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	Jumlah laporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kota Surakarta	1	Rp55.590.000	1	Rp65.000.000	1	Rp77.500.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	83,9	84	84,2		Sosialisasi Anti Korupsi dan Whistle Blowing System	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi dan WBS	2	Rp31.200.000	2	Rp35.000.000	2	Rp38.000.000	Inspektorat	Inspektorat
						Monitoring dan Evaluasi PPID dilaksanakan per semester	Kegiatan	jumlah dokumen pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Publik di semua perangkat daerah kategori informatif	2	Rp750.000	2	Rp50.000.000	2	Rp50.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Bimtek penguatan pengelola PPID Pelaksana	Kegiatan	Kegiatan pengelolaan keterbukaan informasi di PPID Pelaksana berjalan sesuai ketentuan	1	Rp3.445.000	2	Rp22.540.000	2	Rp22.540.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
						Uji Konsekuensi PPID	dokumen	kegiatan uji konsekuensi menghasilkan dokumen informasi yang dikecualikan	1	Rp14.680.000	0	Rp0	0	Rp0	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
						Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan	1	Rp7.100.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	dokumen	jumlah dokumen implementasi penanganan benturan kepentingan yang disusun	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh perangkat daerah
						Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	dokumen	jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang disusun	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	60	65	70		Penyusunan SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah	Dokumen	Jumlah SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah yang tersusun	1	Rp2.000.000	0	Rp0	1	Rp2.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
						Pengukuran IKK (self Assessment)	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang diukur	1	Rp5.000.000	0	Rp0	1	Rp5.000.000	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
						Pengukuran IKK berdasarkan timeline LAN	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang terpilih LAN untuk diukur	0	Rp0	1	Rp5.000.000	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Perangkat Daerah pemrakarsa Produk Hukum Daerah tersampling
						Evaluasi IKK	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi	0	Rp0	1	Rp5.000.000	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	70	80	85		1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perwali yang akan disusun atau diujikan pembahasan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Perda/Perwali	20	Rp10.000.000	20	Rp10.000.000	20	Rp10.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
						1. Evaluasi terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Laporan	Jumlah Laporan Akhir Evaluasi Perda	2	Rp38.400.000	2	Rp38.400.000	2	Rp38.400.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	86,5	87,5	90	Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	Menyusun dokumen kebijakan pengelolaan arsip	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan arsip yang diterbitkan	1	Rp50.000.000	1	Rp262.222.000	0	Rp0	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Monitoring dan evaluasi Implementasi SRIKANDI - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (e-office)	Instansi	Jumlah instansi yang dilakukan move Implementasi Srikandi	75	Rp50.000.000	119	Rp262.222.000	124	Rp102.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
						Monitoring dan Evaluasi, serta audit pengawasan kearsipan internal dan eksternal	Dokumen	Jumlah dokumen move kearsipan internal dan eksternal	1	Rp62.000.000	1	Rp100.370.000	1	Rp80.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
						Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting (Aplikasi TNDE)	Instansi	Jumlah pengguna aplikasi SRIKANDI	106	Rp50.000.000	129	Rp262.222.000	137	Rp102.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
						Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting SIKN/JIKN terintegrasi ANRI	orang	Jumlah pengguna layanan SIKN/JIKN	50	Rp36.413.700	100	Rp46.288.000	150	Rp55.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,7	3	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Pembinaan Statistik Sektoral Rabu Cantik di Perangkat Daerah Kota Sumakarta	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat pembinaan statistik sektoral Rabu Cantik	17	Rp5.300.000	18	Rp7.000.000	35	Rp15.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
						Bimtek penyusunan metadata indikator, kegiatan, variabel	orang	Jumlah pengelola data yang mengikuti bimtek	60	Rp12.780.000	60	Rp28.180.000	60	Rp30.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
						Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Data Sektoral	orang	Jumlah pengelola data yang mendapatkan peningkatan kapasitas	60	Rp12.780.000	65	Rp31.255.000	65	Rp35.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
						Penilaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	kegiatan	Jumlah kegiatan Lomba Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Rp16.250.000	1	Rp44.795.000	1	Rp45.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	kegiatan	Jumlah kegiatan evaluasi penyusunan metadata	1	Rp43.600.000	1	Rp16.180.000	1	Rp17.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70	72,75	75	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	Nilai	Nilai Hasil Penilaian ITKP oleh LKPP	70	Rp487.386.000	72,5	Rp931.400.000	75	Rp931.400.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
						Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar LPSE (Surveilens ISO 17 Standar Layanan LPSE)	Kegiatan	Jumlah kegiatan surveilens ISO 17 Standar Layanan LPSE	0	Rp0	1	Rp52.000.000	1	Rp52.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
					Pemeliharaan aplikasi pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	Jumlah aplikasi pendukung pengadaan barang dan jasa yang terpelihara	1	Rp75.450.000	1	Rp90.000.000	1	Rp90.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					Pembinaan/ sosialisasi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPKJ	Orang	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen dan PPKJ yang dibina	162	Rp78.057.000	162	Rp150.000.000	162	Rp150.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
					Pelaksanaan Clearing House	Kegiatan	Jumlah kegiatan clearing house	4	Rp42.630.000	4	Rp54.000.000	4	Rp54.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					Pendampingan eKatalog Lokal	OPD/unit penyedia	Jumlah OPD/unit penyedia yang dilakukan pendampingan eKatalog	100	Rp26.300.000	100	Rp15.000.000	100	Rp15.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
					Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	162	Rp75.757.000	162	Rp105.000.000	162	Rp105.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
					Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa	30	Rp38.615.000	30	Rp105.500.000	30	Rp105.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
					Asistensi Pengadaan Barang/Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang mendapat asistensi pengadaan barang/jasa	200	Rp17.860.000	200	Rp21.600.000	200	Rp21.600.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
					Pelatihan Sirup	OPD/unit	Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan sirup	200	Rp9.911.000	200	Rp25.000.000	200	Rp25.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
					Review PDN Barang Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang dilakukan review PDN	160	Rp0	160	Rp20.000.000	0	Rp20.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
					Melakukan reviu tata kelola PBJ	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola PBJ	1	Rp1.650.000	1	Rp5.500.000	1	Rp6.000.000	Inspektorat	Inspektorat	
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	Laporan	Jumlah laporan rakor Monev barang dan jasa yang terlaksana	1	Rp39.632.000	1	Rp95.500.000	1	Rp95.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH			
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	644	Rp564.853.000	644	Rp700.000.000	644	Rp700.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah	
						Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Aset	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset	644	Rp501.340.000	644	Rp500.000.000	644	Rp500.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah	
						Melakukan reviu Laporan Keuangan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah	1	Rp70.000.000	1	Rp88.000.000	1	Rp90.000.000	Inspektorat	Inspektorat	
						Melakukan reviu tata kelola BMD	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola BMD	1	Rp4.650.000	1	Rp5.500.000	1	Rp6.000.000	Inspektorat	Inspektorat	
						Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan	644	Rp325.000.000	644	Rp350.000.000	644	Rp350.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
						Pelaksanaan Pengelolaan Aset Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan Aset	644	Rp605.015.400	644	Rp600.000.000	644	Rp600.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah	
		Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	1	Rp75.000.000	1	Rp75.000.000	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda					
	Tingkat tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	96	97	97,5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindakan lanjut hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan Kegiatan Rakorwas	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Rakorwas	4	Rp2.800.000	4	Rp3.780.000	4	Rp4.000.000	Inspektorat	Inspektorat	

85.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	324	325	327	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	Pembinaan jabatan fungsional	kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan jabatan fungsional	1	Rp5.750.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						Workshop untuk jabatan fungsional	kegiatan	jumlah kegiatan workshop untuk jabatan fungsional penyertaan	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	evaluasi hasil tindak lanjut workshop tentang penerapan penempatan nomor 1 tahun 2023	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	mengikuti penilaian sistem merit pada area ketiga pengembangan karir dan selama melakukan penilaian selalu melakukan move	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	1	Rp29.040.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
					Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	penyusunan penghargaan bagi ASN Berprestasi	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	Rp. 60.086.412	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						pembekalan bagi ASN menjelang purna tugas	kegiatan	jumlah kegiatan yg dilaksanakan	1	Rp142.912.624	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						pendampingan kewirausahaan bagi ASN purna tugas	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	1	Rp51.870.470	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Terselenggaranya Layanan Administrasi kepegawaian	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	1	Rp14.795.400	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	perumusan kebijakan pengelolaan kinerja	Dokumen	jumlah laporan yang disusun	1	Rp1.913.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						evaluasi penilaian kinerja	kegiatan	jumlah kegiatan evaluasi penilaian kinerja yang dilaksanakan	1	Rp22.550.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						coaching dan mentoring peningkatan kinerja	dokumen	jumlah dokumen coaching dan mentoring peningkatan kinerja yang disusun	0	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						uji kesehatan bagi PNS sakit	dokumen	jumlah dokumen uji kesehatan bagi PNS sakit yang disusun	1	Rp9.976.260	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						pemeriksaan tes narkoba bagi ASN	dokumen	jumlah dokumen hasil pemeriksaan tes narkoba bagi ASN yang disusun	0	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Menyusun info faktor jabatan (bagian organisasi berkaitan dengan evaluasi jabatan)	dokumen	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang disusun	1	Rp187.000.000	1	Rp0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian organisasi Setda Kota Sukakarta
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan	kegiatan	jumlah FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan yang dilaksanakan	1	Rp5.312.524	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Menyusun Dokumen Rencana Suksesi untuk menduduki jabatan (talent pool)	dokumen	jumlah dokumen rencana suksesi untuk talent pool yang disusun	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
						Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan ASN	Dokumen	jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	1	Rp45.636.700	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SIMPEG	paket	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	5	Rp230.000.000	5	Rp0	3	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Pengeolaan Data Kepegawaian	laporan	jumlah laporan terkait pengolahan data kepegawaian yang terlaksana	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						Monitoring an Evaluasi pelaksanaan pelatihan	dokumen	jumlah dokumen monev pelatihan yang dilaksanakan	1	Rp8.688.800	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	laporan	jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	3	Rp1.019.353.200	3	Rp0	3	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Menyusun dokumen analisis kesenjangan kompetensi	dokumen	jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi (pendidikan) yang disusun	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	dokumen	jumlah dokumen penilaian mandiri sistem merit yang disusun	1	Rp29.040.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
						Terlaksananya Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi perwali kode etik	1	Rp1.800.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	67	69	71		Sosialisasi Tim Agen Perubahan	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi agen perubahan yang dilaksanakan	2	Rp8.450.000	1	Rp0	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah
						Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	Laporan	Jumlah Laporan Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	4	Rp10.600.000	4	Rp2.000.000	4	Rp2.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
						Monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	1	Rp75.000.000	1	Rp75.000.000	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					PERANGKAT DAERAH		
		2024	2025	2026			SATUAN	INDIKATOR	2024	JML ANGGARAN	2025	JML ANGGARAN	2026	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,68	4,7	4,72	Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	Jumlah Laporan PEKPPP	1	Rp100.000.000	1	Rp0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
						Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	dokumen	Jumlah dokumen penetapan peta proses bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	1	Rp250.000.000	1	Rp0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
						Monitoring dan Evaluasi peta proses bisnis dan SOP	dokumen	Jumlah dokumen laporan movev peta proses bisnis dan SOP	1	Rp0	1	Rp100.000.000	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
						Monev penerapan Sistem Kerja	Laporan	Jumlah laporan movev penerapan Sistem Kerja	1	Rp0	1	Rp0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,66	94,68	94,7	Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah laporan movev SP dan SOP	1	Rp40.000.000	1	Rp0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
						Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	dokumen	Jumlah buku analisis aduan	4	Rp3.590.000	4	Rp33.475.000	4	Rp35.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87	88	89	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 4 kali setahun	Laporan	Jumlah Laporan SKM	2	Rp75.000.000	2	Rp75.000.000	2	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan prima pada seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Pelaksanaan movev SKM seluruh UPP	Dokumen	Jumlah Laporan tinjau hasil SKM	2	Rp100.000.000	2	Rp100.000.000	2	Rp100.000.000	Bagian Organisasi Setda

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024						PERANGKAT DAERAH	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincuh, Kolaboratif, dan Akuntabel														
Pensederhanaan Birokrasi (Pensederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Pensederhanaan Struktur Birokrasi*	100	Tersedianya kebijakan pensederhanaan birokrasi (Pensederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	Dokumen	Jumlah Perwali Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pensederhanaan birokrasi pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp150.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Pensederhanaan Birokrasi*	4	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi squad model) pada Instansi Pemerintah	Penyusunan kebijakan Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah penetapan SK Ketua Tim kerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Penyusunan alur pembentukan POKJA atau Tim kerja	Dokumen	Jumlah dokumen alur pembentukan POKJA atau Tim Kerja	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	Penerapan Manajemen Talenta ASN	Persen	persentase ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan kinerja dan kompetensi	0	0	0	80	80	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Evaluasi Implementasi Jadwal Kerja Khusus (Shift)	kegiatan	Jumlah kegiatan terkait evaluasi implementasi jadwal kerja khusus/shift	1	0	0	0	1	Rp2.400.000	BKPSDM	Perangkat Daerah tertentu
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca pensederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Monv Ev Efektivitas Tim Kerja	kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi efektivitas Tim Kerja	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM dan Bagian Organisasi	BKPSDM dan Bagian Organisasi
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,7	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Review Arsitektur SPBE	Dokumen	jumlah dokumen review SPBE	1	1	0	0	2	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Reviu Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	Reviu Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Reviu Peraturan Wali Kota tentang SPBE	1	1	0	0	2	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Reviu kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Reviu kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	1	0	0	0	1	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Reviu kebijakan Tim Asesor Internal SPBE	Reviu kebijakan Tim Asesor Internal SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Asesor Internal SPBE	1	0	0	0	1	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan unsur dalam Domain tata kelola SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan unsur tata kelola SPBE	1	1	1	0	3	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan audit TIK	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit TIK	1	1	0	0	2	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Manajemen SPBE	0	1	1	0	2	Rp0	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	0	1	0	0	1	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	1	1	1	1	4	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	85	Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP	dokumen	Jumlah Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP yang tersusun	1	0	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
				Penyelenggaraan Workshop eSAKIP	Orang	Jumlah Peserta Workshop yang memahami eSAKIP	0	100	0	0	100	Rp24.700.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pengisian SI SAKIP TW I - TW IV sehingga unsur Pencapaian Kinerja IKU Perangkat Daerah menjadi salah satu unsur besaran TPP berdasar penilaian produktivitas kerja	Laporan	Laporan Capaian kinerja Triwulan Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	4	Rp10.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,7	Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	Penyusunan SOP Layanan MPP Digital	Dokumen	Jumlah SOP yang disusun	0	0	0	2	2	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
			Tersedianya MPP digital	Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	Dokumen	Jumlah Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	0	5	5	5	15	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP Digital	Dokumen	Jumlah laporan monev penyelenggaraan MPP Digital	0	0	0	1	1	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona	0,75	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan evaluasi Pembangunan ZI WBK/WBBM	0	10	0	0	10	Rp40.050.000	Inspektorat	Perangkat Daerah Dalam Pembangunan Zona Integritas

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
	Integritas (ZI)			Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp500.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Terlaksananya penguatan SPIP	Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	0	0	35	0	35	Rp30.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				* Melibatkan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko dan menekankan kepada Perangkat Daerah dalam materi sosialisasi bawa Pejabat dalam suatu Perangkat Daerah adalah Unit Pemilik Risiko sehingga harus ikut andil dalam Identifikasi Risiko, FGD dan penyusunan RTP serta lebih memperhatikan risiko Fraud dalam penyusunannya * Penyusunan Risiko berdasar Critical Success Factor dan difasilitasi dalam sistem SARKEMIS * Membuat Arah Kebijakan supaya Perangkat Daerah lebih terbuka terhadap kemungkinan risiko fraud dan tagih fraud akan dimulai saat identifikasi risiko sampai RTP * Penanganan realisasi capaian Sakip dibawah 70% wajib membuat Keterjadian Risiko (AB3) dan mencatatnya sebagai risiko di tahun berikutnya	Laporan	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Manajemen Risiko	0	0	0	1	1	Rp105.200.000	Bagian Adm. Pemb. Setda	Bagian Adm. Pemb. Setda
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5	Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	OPD	Jumlah OPD/Unit yang menyelesaikan aduan yang masuk	121	121	121	121	484	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aduan	orang	Jumlah Peserta Bimtek yang memahami peran dan fungsi sbg pengelola aduan	125	0	0	0	125	Rp41.037.500	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Review Perwali No 8.1 tahun 2023 tentang Ulas	Dokumen	jumlah Perwali Pengelolaan Aduan Masyarakat yang lebih luas pengaturannya yang diterbitkan	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aduan	Laporan	Jumlah laporan hasil pengelola aduan lebih baik	1	1	1	1	4	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				koordinasi dan konsultasi dengan kementerian dan kementerian	Dokumen	jumlah dokumen hasil sinkronisasi aplikasi Ulas dan SIMN Lapar	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Melakukan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus	3	3	3	3	12	Rp88.500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	Jumlah laporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp55.590.000	Inspektorat	Inspektorat
				Sosialisasi Anti Korupsi dan Whistle Blowing System	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi dan WBS	0	0	0	2	2	Rp31.200.000	Inspektorat	Inspektorat
				Monitoring dan Evaluasi PPIID dilaksanakan per semester	Kegiatan	jumlah dokumen pelaksanaan movev Keterbukaan Informasi Publik di semua perangkat daerah kategori informatif	1	0	1	0	2	Rp750.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Buitek penguatan pengelola PPIID Pelaksana	Kegiatan	Kegiatan pengelolaan keterbukaan informasi di PPIID Pelaksana berjalan sesuai ketentuan	1	0	0	0	1	Rp3.445.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Uji Konsekuensi PPIID	dokumen	kegiatan uji konsekuensi menghasilkan dokumen informasi yang dikecualikan	1	0	0	0	1	Rp14.680.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan	1	0	0	0	1	Rp7.100.000	BKPSDM	BKPSDM
				Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	dokumen	jumlah dokumen implementasi penanganan benturan kepentingan yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh perangkat daerah
				Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	dokumen	jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	60	Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (evidence based policy)	Penyusunan SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi	Dokumen	Jumlah SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi	0	0	1	0	1	Rp2.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah		Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah yang tersusun								
				Pengukuran IKK (self Assessment)	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang diukur	0	0	0	1	1	Rp5.000.000	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengukuran IKK berdasarkan timeline LAN	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang terpilih LAN untuk diukur	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Perangkat Daerah pemrakarsa Produk Hukum Daerah tersampling
				Evaluasi IKK	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	70	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perwali yang akan disusun atau diajukan pembahasan.	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Perda/Perwali	5	5	5	5	20	Rp10.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Evaluasi terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Laporan	Jumlah Laporan Akhir Evaluasi Perda	0	0	2	0	2	Rp38.400.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	86,5	Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	Menyusun dokumen kebijakan pengelolaan arsip	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan arsip yang diterbitkan	0	0	1	0	1	Rp50.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (e-office)	Instansi	Jumlah instansi yang dilakukan monev implementasi Srikandi	0	15	60	0	75	Rp50.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring dan Evaluasi, serta audit pengawasan kearsipan internal dan eksternal	Dokumen	Jumlah dokumen monev kearsipan internal dan eksternal	0	0	0	1	1	Rp62.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
				Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting (Aplikasi TNDE)	Instansi	Jumlah pengguna aplikasi SRIKANDI	0	0	0	106	106	Rp50.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
				Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting SIKN/JIKN terintegrasi ANRI	orang	Jumlah pengguna layanan SIKN/JIKN	0	0	0	50	50	Rp36.413.700	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Pembinaan Statistik Sektoral Rabu Cantik di Perangkat Daerah Kota Surakarta	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat pembinaan statistik sektoral Rabu Cantik	9	8	0	0	17	Rp5.300.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Bimtek penyusunan metadata indikator, kegiatan, variabel	orang	Jumlah pengelola data yang mengikuti bimtek	0	0	60	0	60	Rp12.780.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Data Sektoral	orang	Jumlah pengelola data yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	60	0	0	60	Rp12.780.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Penilaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	kegiatan	Jumlah kegiatan Lomba Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	0	0	1	1	Rp16.250.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	Evaluasi Penyusunan Metadata Kegiatan, Indikator, dan Variabel	kegiatan	Jumlah kegiatan evaluasi penyusunan metadata	0	0	1	0	1	Rp13.600.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	Nilai	Nilai Hasil Penilaian ITKP oleh LKPP	0	0	0	70	70	Rp487.386.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar LPSE (Surveilens ISO 17 Standar Layanan LPSE)	Kegiatan	Jumlah kegiatan surveilens ISO 17 Standar Layanan LPSE	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
				Pemeliharaan aplikasi pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	Jumlah aplikasi pendukung pengadaan barang dan jasa yang terpelihara	0	0	0	1	1	Rp75.450.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pembinaan/ sosialisasi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPBJ	Orang	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen dan PPBJ yang dibina	162	0	0	0	162	Rp78.057.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Clearing House	Kegiatan	Jumlah kegiatan clearing house	1	1	1	1	4	Rp42.630.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pendampingan eKatalog Lokal	OPD/ unit penyedia	Jumlah OPD/ unit penyedia yang dilakukan pendampingan eKatalog	25	25	25	25	100	Rp26.300.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
				Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	162	0	162	Rp75.757.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang/ Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa	0	30	0	0	30	Rp38.615.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Asistensi Pengadaan Barang/ Jasa	OPD/ unit	Jumlah OPD yang mendapat asistensi pengadaan barang/ jasa	100	0	0	100	200	Rp17.860.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Pelatihan Sirup	OPD/unit	Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan sirup	100	0	0	100	200	Rp9.911.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Review PDN Barang Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang dilakukan review PDN	160	0	0	0	160	Rp0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan reviu tata kelola PBJ	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola PBJ	0	0	0	1	1	Rp4.650.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah laporan rakor Movev barang dan jasa yang terlaksana	1	1	1	1	4	Rp39.632.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	161	161	161	161	644	Rp564.853.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Aset	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset	161	161	161	161	644	Rp501.340.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan reviu Laporan Keuangan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah	1	0	0	0	1	Rp70.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Melakukan reviu tata kelola BMD	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola BMD	0	0	1	0	1	Rp4.650.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan	161	161	161	161	644	Rp325.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Pengelolaan Aset Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan Aset	161	161	161	161	644	Rp605.015.400	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis Elektronik	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	0	1	0	0	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024						PERANGKAT DAERAH	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
	Tingkat tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	96	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan Kegiatan Rakorwas	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Rakorwas	1	1	1	1	4	Rp2.800.000	Inspektorat	Inspektorat
88.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	324	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	Pembinaan jabatan fungsional	kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan jabatan fungsional	1	0	0	0	1	Rp5.750.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Workshop untuk jabatan fungsional	kegiatan	jumlah kegiatan workshop untuk jabatan fungsional penyektaraan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	evaluasi hasil tindak lanjut workshop tentang penerapan permenpan nomor 1 tahun 2023	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	mengkikuti penilaian sistem merit pada area ketiga pengembangan karir dan selama melakukan penilaian selalu melakukan movev	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	0	0	1	0	1	Rp29.040.000	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0	1	0	1	Rp. 60.086.412	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				pembekalan bagi ASN menjelang purna tugas	kegiatan	jumlah kegiatan yg dilaksanakan	0	1	0	0	1	Rp142.912.624	BKPSDM	BKPSDM
				pendampingan kewirausahaan bagi ASN purna tugas	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	0	0	1	0	1	Rp51.870.470	BKPSDM	BKPSDM
				Terselenggaranya Layanan Administrasi kepegawaian	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	0	0	0	1	1	Rp14.795.400	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	perumusan kebijakan pengelolaan kinerja	Dokumen	jumlah laporan yang disusun	1	0	0	0	1	Rp1.913.000	BKPSDM	BKPSDM
						evaluasi penilaian kinerja	kegiatan	jumlah kegiatan evaluasi penilaian kinerja yang dilaksanakan	0	1	0	0	1	Rp22.550.000
			coaching dan mentoring peningkatan kinerja	dokumen	jumlah dokumen coaching dan mentoring peningkatan kinerja yang disusun	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah	
			uji kesehatan bagi PNS sakit	dokumen	jumlah dokumen uji kesehatan bagi PNS sakit yang disusun	0	0	0	1	1	Rp9.976.260	BKPSDM	BKPSDM	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				pemeriksaan tes narkoba bagi ASN	dokumen	jumlah dokumen hasil pemeriksaan tes narkoba bagi ASN yang disusun	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun info faktor jabatan (bagian organisasi berkaitan dengan evaluasi jabatan)	dokumen	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang disusun	0	0	1	0	1	Rp187.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian organisasi Setda Kota Surakarta
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan	kegiatan	jumlah FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp5.312.524	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Menyusun Dokumen Rencana Suksesi untuk menduduki jabatan (talent pool)	dokumen	jumlah dokumen rencana suksesi untuk talent pool yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan ASN	Dokumen	jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	1	0	0	0	1	Rp45.636.700	BKPSDM	BKPSDM
				Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SIMPEG	paket	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	0	2	2	1	5	Rp230.000.000	BKPSDM	BKPSDM
				Pengelolaan Data Kepegawaian	laporan	jumlah laporan terkait pengolahan data kepegawaian yang terlaksana	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelatihan	dokumen	jumlah dokumen monev pelatihan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp8.688.800	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	laporan	jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	0	0	3	0	3	Rp1.019.353.200	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dokumen analisis kesenjangan kompetensi	dokumen	jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi (pendidikan) yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	penilaian mandiri sistem merit	dokumen	jumlah dokumen penilaian mandiri sistem merit yang disusun	0	0	1	0	1	Rp29.040.000	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	67	Terlaksananya Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	Melaksanakan kegiatan sosialisasi perwali kode etik	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi perwali kode etik	0	0	0	1	1	Rp1.800.000	BKPSDM	seluruh perangkat daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2024	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2024					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Sosialisasi Tim Agen Perubahan	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi agen perubahan yang dilaksanakan	1	0	0	1	2	Rp8.450.000	BKPSDM	seluruh perangkat daerah
				Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	Laporan	Jumlah Laporan Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	1	1	1	1	4	Rp10.600.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
				Monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	0	0	1	0	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,68	Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	Jumlah Laporan PEKPPP	0	0	1	0	1	Rp100.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
				Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	dokumen	Jumlah dokumen penetapan peta proses bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	0	0	0	1	1	Rp250.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
				Monitoring dan Evaluasi peta proses bisnis dan SOP	dokumen	Jumlah dokumen laporan monev peta proses bisnis dan SOP	0	1	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
				Monev penerapan Sistem Kerja	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan Sistem Kerja	0	0	0	1	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,66	Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah laporan monev SP dan SOP	0	1	0	0	1	Rp40.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
				Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	dokumen	Jumlah buku analisis aduan	1	1	1	1	4	Rp3.590.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 4 kali setahun	Laporan	Jumlah Laporan SKM	0	1	0	1	2	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan prima pada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	Dokumen	Jumlah Laporan tinjau hasil SKM	0	1	0	1	2	Rp100.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025						PERANGKAT DAERAH	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel														
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Struktur Birokrasi*	100	Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	Dokumen	Jumlah Perwadi Peraturan Walikota tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	0	1	0	0	1	Rp200.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
			Tertindakannya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp150.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi*	5	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi squad model) pada instansi Pemerintah	Penyusunan kebijakan Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah penetapan SK Ketua Tim kerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Penyusunan alur pembentukan POKJA atau Tim kerja	Dokumen	Jumlah dokumen alur pembentukan POKJA atau Tim Kerja	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (job family based on competence domain)	Penerapan Manajemen Talenta ASN	Persen	persentase ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan kinerja dan kompetensi	0	0	0	85	85	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Evaluasi Implementasi Jadwal Kerja Khusus (Shift)	kegiatan	Jumlah kegiatan terkait evaluasi implementasi jadwal kerja khusus/shift	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM	Perangkat Daerah Tertantu
			Tertindakannya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Moner Evektivitas Tim Kerja	kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi efektivitas Tim Kerja	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM dan Bagian Organisasi	BKPSDM dan Bagian Organisasi
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,8	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Review Arsitektur SPBE	Dokumen	jumlah dokumen review SPBE	1	1	0	0	2	Rp5.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Revisi Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	Revisi Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Revisi Peraturan Wali Kota tentang SPBE	1	1	0	0	2	Rp3.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Revisi kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Revisi kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Revisi Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	1	0	0	0	1	Rp3.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
				Reviu kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	1	0	0	0	1	Rp3.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksunanya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan unsur dalam Domain tata kelola SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan unsur tata kelola SPBE	1	1	1	0	3	Rp5.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan audit TIK	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit TIK	0	1	0	0	1	Rp2.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Manajemen SPBE	0	1	1	0	2	Rp2.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	0	1	0	0	1	Rp75.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	1	1	1	1	4	Rp10.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	90	Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP	dokumen	Jumlah Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP yang tersusun	1	0	0	0	1	Rp1.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
				Penyelenggaraan Workshop eSAKIP	Orang	Jumlah Peserta Workshop yang memahami eSAKIP	0	100	0	0	100	Rp28.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pengisian SI SAKIP TW I - TW IV sehingga unsur Pencapaian Kinerja IKU Perangkat Daerah menjadi salah satu unsur besaran TPP bertasar penilaian produktivitas kerja	Laporan	Laporan Capaian kinerja Triwulanan Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	4	Rp10.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,8	Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	Penyusunan SOP Layanan MPP Digital	Dokumen	Jumlah SOP yang disusun	0	0	0	0	0	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
			Tersedianya MPP digital	Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	Dokumen	Jumlah Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	6	6	6	6	24	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP Digital	Dokumen	Jumlah laporan monev penyelenggaraan MPP Digital	0	0	0	1	1	Rp0	DPMPPTSP	DPMPPTSP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,75	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan evaluasi Pembangunan ZI WBK/WBBM	0	11	0	0	11	Rp78.000.000	Inspektorat	Perangkat Daerah Dalam Pembangunan Zona Integritas
				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp550.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2	Terlaksananya penguatan SPIP	Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	0	0	35	0	35	Rp45.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				* Melibatkan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko dan mencairkan kepada Perangkat Daerah dalam materi sosialisasi bawa Pejabat dalam suatu Perangkat Daerah adalah Unit Pemilik Risiko sehingga harus ikut andil dalam Identifikasi Risiko, FGD dan penyusunan RTP serta lebih memperhatikan risiko Fraud dalam penyusunannya * Penyusunan Risiko berdasar Critical Success Factor dan difasilitasi dalam sistem SARKEMIS * Membuat Arah Kebijakan supaya Perangkat Daerah lebih terbuka terhadap kemungkinan risiko fraud dan tagung fraud akan dimulai saat identifikasi risiko sampai RTP	Laporan	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Manajemen Risiko	1	0	0	1	2	Rp125.000.000	Bagian Adm. Pemb. Setda	Bagian Adm. Pemb. Setda
				* Penanganan realisasi capaian Saktip dibawah 70% wajib membuat Keterjadian Risiko (AB3) dan mencatatnya sebagai risiko di tahun berikutnya										
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5	Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	OPD	Jumlah OPD/Unit yang menyelesaikan aduan yang masuk	121	121	121	121	484	Rp110.610.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aduan	orang	Jumlah Peserta Bimtek yang memahami peran dan fungsi sbg pengelola aduan	125	0	0	0	125	Rp33.150.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
				Review Perwali No 8.1 tahun 2023 tentang Ulas	Dokumen	jumlah Perwali Pengelolaan Aduan Masyarakat yang lebih luas pengaturannya yang diterbitkan	0	0	0	0	0	Rp1.500.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aduan	Laporan	Jumlah laporan hasil pengelola aduan lebih baik	1	1	1	1	4	Rp57.960.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				koordinasi dan konsultasi dengan kementerian dan kementerian	Dokumen	jumlah dokumen hasil sinkronisasi aplikasi Ulas dan SP4N Lapor	0	1	0	0	1	Rp15.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Melakukan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus	3	3	3	3	12	Rp95.000.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	81	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	Jumlah laporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp65.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Sosialisasi Anti Korupsi dan Whistle Blowing System	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi dan WBS	0	0	0	2	2	Rp35.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Monitoring dan Evaluasi PPID dilaksanakan per semester	Kegiatan	jumlah dokumen pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Publik di semua perangkat daerah kategori informatif	1	0	1	0	2	Rp50.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Bimtek penguatan pengelola PPID Pelaksana	Kegiatan	Kegiatan pengelolaan keterbukaan informasi di PPID Pelaksana berjalan sesuai ketentuan	1	1	0	0	2	Rp22.510.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Uji Konsekuensi PPID	dokumen	kegiatan uji konsekuensi menghasilkan dokumen informasi yang dikecualikan	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	dokumen	jumlah dokumen implementasi penanganan benturan kepentingan yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh perangkat daerah
				Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	dokumen	jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH			
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA	
						Kota Surakarta yang disusun									
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	65	Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (evidence based policy)	Penyusunan SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah	Dokumen	Jumlah SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah yang tersusun	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
				Pengukuran IKK (self Assessment)	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang diukur	0	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengukuran IKK berdasarkan timeline LAN	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang terpilih LAN untuk diukur	0	0	1	0	1	Rp5.000.000	Bagian Hukum Setda	Perangkat Daerah pemrakarsa Produk Hukum Daerah tersampling	
				Evaluasi IKK	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi	0	0	0	1	1	Rp5.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
Bagian Hukum Setda	Indeks Reformasi Hukum	80	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perwali yang akan disusun atau diajukan pembahasan.	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Perda/Perwali	5	5	5	5	20	Rp10.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Evaluasi terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Laporan	Jumlah Laporan Akhir Evaluasi Perda	0	0	2	0	2	Rp38.400.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
			Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	Menyusun dokumen kebijakan pengelolaan arsip	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan arsip yang diterbitkan	0	0	0	1	1	Rp262.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI - Sistem Informasi Kearsipan Dimain Terintegrasi (e-office)	Instansi	Jumlah instansi yang dilakukan monev implementasi Srikandi	0	30	89	0	119	Rp262.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	87,5	Monitoring dan Evaluasi, serta audit pengawasan kearsipan internal dan eksternal		Dokumen	Jumlah dokumen monev kearsipan internal dan eksternal	0	0	0	1	1	Rp100.370.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah	
			Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting (Aplikasi TNDF)		Instansi	Jumlah pengguna aplikasi SRIKANDI	0	0	0	129	129	Rp262.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
				Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting SIKN/JIKN terintegrasi ANRI	orang	Jumlah pengguna layanan SIKN/JIKN	0	0	0	100	100	Rp46.288.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,7	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Pembinaan Statistik Sektoral Rabu Cantik di Perangkat Daerah Kota Surakarta	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat pembinaan statistik sektoral Rabu Cantik	9	9	0	0	18	Rp7.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Bimtek penyusunan metadata indikator, kegiatan, variabel	orang	Jumlah pengelola data yang mengikuti bimtek	0	0	60	0	60	Rp28.180.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Data Sektoral	orang	Jumlah pengelola data yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	65	0	0	65	Rp34.255.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Penilaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	kegiatan	Jumlah kegiatan Lomba Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	0	0	1	1	Rp11.795.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	kegiatan	Jumlah kegiatan evaluasi penyusunan metadata	0	0	0	1	1	Rp16.180.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	72,73	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	Nilai	Nilai Hasil Penilaian ITKP oleh LKPP	0	0	0	72,5	72,5	Rp931.400.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Penetapan Standar LPSE (Surveilans ISO 17 Standar Layanan LPSE)	Kegiatan	Jumlah kegiatan surveilans ISO 17 Standar Layanan LPSE	0	0	0	1	1	Rp52.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
				Pemeliharaan aplikasi pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	Jumlah aplikasi pendukung pengadaan barang dan jasa yang terpelihara	0	0	0	1	1	Rp90.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pembinaan/sosialisasi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPKJ	Orang	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen dan PPKJ yang dibina	162	0	0	0	162	Rp150.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Clearing House	Kegiatan	Jumlah kegiatan clearing house	1	1	1	1	4	Rp54.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pendampingan eKatalog Lokal	OPD/unit penyedia	Jumlah OPD/unit penyedia yang dilakukan pendampingan eKatalog	25	25	25	25	100	Rp15.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
				Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	162	0	162	Rp105.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa	0	30	0	0	30	Rp105.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Asistensi Pengadaan Barang/Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang mendapat asistensi pengadaan barang/jasa	100	0	0	100	200	Rp21.600.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pelatihan Sirup	OPD/unit	Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan sirup	100	0	0	100	200	Rp25.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Review PDN Barang Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang dilakukan review PDN	160	0	0	0	160	Rp20.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan reviu tata kelola PBJ	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola PBJ	0	0	0	1	1	Rp5.500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah laporan rakor Monev barang dan jasa yang terlaksana	1	1	1	1	4	Rp95.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	161	161	161	161	644	Rp700.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan aset	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Aset	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset	161	161	161	161	644	Rp500.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP		Melakukan reviu Laporan Keuangan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah	1	0	0	0	1	Rp88.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Melakukan reviu tata kelola BMD	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola BMD	0	0	1	0	1	Rp5.500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan	161	161	161	161	644	Rp350.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Pengelolaan Aset Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan Aset	161	161	161	161	644	Rp600.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
				Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	1	0	0	0	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
	Tingkat tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	97	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan Kegiatan Rakorwas	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Rakorwas	1	1	1	1	4	Rp3.780.000	Inspektorat	Inspektorat
SS.2: Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	325	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	Pembinaan jabatan fungsional	kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan jabatan fungsional	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Workshop untuk jabatan fungsional	kegiatan	jumlah kegiatan workshop untuk jabatan fungsional penyediaan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	evaluasi hasil tindak lanjut workshop tentang penerapan penempatan nomor 1 tahun 2023	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	mengkikuti penilaian sistem merit pada area ketiga pengembangan karir dan selama melakukan penilaian selalu melakukan monev	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				pembekalan bagi ASN menjelang purna tugas	kegiatan	jumlah kegiatan yg dilaksanakan	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				pendampingan kewirausahaan bagi ASN purna tugas	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Terseleenggaranya Layanan Administrasi kepegawaian	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	perumusan kebijakan pengelolaan kinerja	dokumen	jumlah laporan yang disusun	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				evaluasi penilaian kinerja	kegiatan	jumlah kegiatan evaluasi penilaian kinerja yang dilaksanakan	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	coaching dan mentoring peningkatan kinerja	dokumen	jumlah dokumen coaching dan mentoring peningkatan kinerja yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah			

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
				uji kesehatan bagi PNS sakit	dokumen	jumlah dokumen uji kesehatan bagi PNS sakit yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				pemeriksaan tes narkoba bagi ASN	dokumen	jumlah dokumen hasil pemeriksaan tes narkoba bagi ASN yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun info faktor jabatan (bagian organisasi berkaitan dengan evaluasi jabatan)	dokumen	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang disusun	0	1	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian organisasi Setda Kota Surakarta
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan	kegiatan	jumlah FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Menyusun Dokumen Rencana Suksesi untuk menduduki jabatan (talent pool)	dokumen	jumlah dokumen rencana suksesi untuk talent pool yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan ASN	Dokumen	jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SIMPEG	paket	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	0	2	2	1	5	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Pengelolaan Data Kepegawaian	laporan	jumlah laporan terkait pengolahan data kepegawaian yang terlaksana	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring an Evaluasi pelaksanaan pelatihan	dokumen	jumlah dokumen monev pelatihan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	0	0	3	0	3	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dokumen analisis kesenjangan kompetensi	dokumen	jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi (pendidikan) yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	penilaian mandiri sistem merit	dokumen	jumlah dokumen penilaian mandiri sistem merit yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	69	Terlaksananya Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	Melaksanakan kegiatan sosialisasi perwali kode etik	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi perwali kode etik	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2025	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2025					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	69	Terlaksananya Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	Melaksanakan kegiatan sosialisasi perwali kode etik	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi perwali kode etik	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah
			Sosialisasi Tim Agen Perubahan	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi agen perubahan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah	
			Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	Laporan	Jumlah Laporan Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	1	1	1	1	4	Rp2.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
			Monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	0	0	1	0	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,7	Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	Jumlah Laporan PEKPPP	0	0	1	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
			Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	dokumen	Jumlah dokumen penetapan peta proses bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	1	0	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
			Monitoring dan Evaluasi peta proses bisnis dan SOP	dokumen	Jumlah dokumen laporan monev peta proses bisnis dan SOP	0	1	0	0	1	Rp100.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
			Monev penerapan Sistem Kerja	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan Sistem Kerja	0	0	0	1	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,68	Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah laporan monev SP dan SOP	0	1	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
			Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	dokumen	Jumlah buku analisis aduan	1	1	1	1	4	Rp33.475.000	Diskominfo SP	Sehuruh Perangkat Daerah	
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 4 kali setahun	Laporan	Jumlah Laporan SKM	0	1	0	1	2	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan prima pada seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	Dokumen	Jumlah Laporan tinjau hasil SKM	0	1	0	1	2	Rp100.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2026

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026						PERANGKAT DAERAH	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincuh, Kolaboratif, dan Akuntabel														
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Percentase Penyederhanaan Struktur Birokrasi*	100	Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	Dokumen	Jumlah Perwali Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Penilaian Maturitas Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp150.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi*	5	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi squad model) pada Instansi Pemerintah	Penyusunan kebijakan Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah penetapan SK Ketua Tim kerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Penyusunan alur pembentukan POKJA atau Tim Kerja	Dokumen	Jumlah dokumen alur pembentukan POKJA atau Tim Kerja	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	Penerapan Manajemen Talenta ASN	Persen	persentase ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan kinerja dan kompetensi	0	0	0	90	90	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Evaluasi Implementasi Jadwal Kerja Khusus (Shift)	kegiatan	Jumlah kegiatan terkait evaluasi implementasi jadwal kerja khusus/ shift	0	0	0	0	0	Rp0	BKPSDM	Perangkat Daerah Tertantu
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Moncv Efektivitas Tim Kerja	kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi efektivitas Tim Kerja	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM dan Bagian Organisasi	BKPSDM dan Bagian Organisasi
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Review Arsitektur SPBE	Dokumen	jumlah dokumen review SPBE	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Reviu Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	Reviu Peraturan Wali Kota Surakarta tentang SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Reviu Peraturan Wali Kota tentang SPBE	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Reviu kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Reviu kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Reviu kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	Reviu kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Reviu Kebijakan Tim Assesor Internal SPBE	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Diskominfo SP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKBANA
				Revisi Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah Dokumen Revisi Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kota Surakarta	0	1	0	0	1	Rp5.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan unsur dalam Domain tata kelola SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan unsur tata kelola SPBE	0	1	1	0	2	Rp1.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan audit TIK	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Audit TIK	0	1	0	0	1	Rp2.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Manajemen SPBE	0	1	1	0	2	Rp5.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	dokumen	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Peta Rencana SPBE	0	1	0	0	1	Rp75.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Surakarta	1	1	1	1	4	Rp10.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	95	Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP	dokumen	Jumlah Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP yang tersusun	0	0	0	1	1	Rp1.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
				Penyelenggaraan Workshop eSAKIP	Orang	Jumlah Peserta Workshop yang memahami eSAKIP	0	100	0	0	100	Rp28.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pengisian SI SAKIP TW I - TW IV sehingga unsur Pencapaian Kinerja IKU Perangkat Daerah menjadi salah satu unsur besaran TPP bertasar pentatan produktivitas kerja	Laporan	Laporan Capaian kinerja Triwulanan Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	4	Rp10.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	Penyusunan SOP Layanan MPP Digital	Dokumen	Jumlah SOP yang disusun	0	0	0	0	0	Rp0	DPMP/TSP	DPMP/TSP
			Tersedianya MPP digital	Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	Dokumen	Jumlah Dokumen Perizinan yang terbit melalui MPP Digital	7	7	7	7	28	Rp0	DPMP/TSP	DPMP/TSP
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP Digital	Dokumen	Jumlah laporan money penyelenggaraan MPP Digital	0	0	0	1	1	Rp0	DPMP/TSP	DPMP/TSP
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	1,5	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan evaluasi Pembangunan ZI WBK/WBBM	0	12	0	0	12	Rp80.000.000	Inspektorat	Perangkat Daerah Dalam Pembangunan Zona Integritas

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp600.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4	Terlaksananya penguatan SPIP	Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	OPD	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Evaluasi Penerapan SPIP Terintegrasi	0	0	35	0	35	Rp50.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				* Melibatkan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko dan menekankan kepada Perangkat Daerah dalam materi sosialisasi bawa Pejabat dalam suatu Perangkat Daerah adalah Unit Pemilik Risiko sehingga harus ikut andil dalam Identifikasi Risiko, FGD dan penyusunan RTP serta lebih memperhatikan risiko Fraud dalam penyusunannya * Penyusunan Risiko berdasar Critical Success Factor dan difasilitasi dalam sistem SARKEMIS * Membuat Arah Kebijakan supaya Perangkat Daerah lebih terbuka terhadap kemungkinan risiko fraud dan tagih fraud akan dimulai saat identifikasi risiko sampai RTP * Penanganan realisasi capaian Sakip dibawah 70% wajib membuat Keterjadian Risiko (AB3) dan mencatatnya sebagai risiko di tahun berikutnya	Laporan	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Manajemen Risiko	1	0	0	1	2	Rp135.000.000	Bagian Adm. Pemb. Setda	Bagian Adm. Pemb. Setda
				Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	OPD	Jumlah OPD/Unit yang menyelesaikan aduan yang masuk	121	121	121	121	484	Rp110.610.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5		Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aduan	orang	Jumlah Peserta Bimtek yang memahami peran dan fungsi sbg pengelola aduan	125	0	0	0	125	Rp50.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Review Perwali No 8.1 tahun 2023 tentang Ulas	Dokumen	jumlah Perwali Pengelolaan Aduan Masyarakat yang lebih luas pengaturannya yang diterbitkan	1	0	0	0	1	Rp1.500.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aduan	Laporan	Jumlah laporan hasil pengelola aduan lebih baik	1	1	1	1	4	Rp57.960.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				koordinasi dan konsultasi dengan kemenpan rb dan kemenkominfo	Dokumen	jumlah dokumen hasil sinkronisasi aplikasi Ulas dan SP4N Lapor	0	1	0	0	1	Rp15.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Melakukan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus	3	3	3	3	12	Rp100.000.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	84,2	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	Jumlah laporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kota Surakarta	0	0	0	1	1	Rp77.500.000	Inspektorat	Inspektorat
				Sosialisasi Anti Korupsi dan Whistle Blowing System	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi dan WBS	0	0	0	2	2	Rp38.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Monitoring dan Evaluasi PPID dilaksanakan per semester	Kegiatan	jumlah dokumen pelaksanaan moncv Keterbukaan Informasi Publik di semua perangkat daerah kategori informatif	1	0	1	0	2	Rp50.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Bimtek penguatan pengelola PPID Pelaksana	Kegiatan	Kegiatan pengelolaan keterbukaan informasi di PPID Pelaksana berjalan sesuai ketentuan	1	1	0	0	2	Rp22.540.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Uji Konsekuensi PPID	dokumen	kegiatan uji konsekuensi menghasilkan dokumen informasi yang dikecualikan	0	0	0	0	0	Rp0	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	dokumen	jumlah dokumen implementasi penanganan benturan kepentingan yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh perangkat daerah
				Monitoring dan evaluasi lingkungan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	dokumen	jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026						PERANGKAT DAERAH	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	70	Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (evidence based policy)	Penyusunan SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah	Dokumen	Jumlah SE Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Daerah yang tersusun	0	0	1	0	1	Rp2.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
				Pengukuran IKK (self Assessment)	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang diukur	0	0	0	1	1	Rp5.000.000	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengukuran IKK berdasarkan timeline LAN	Dokumen	Jumlah Sampel Produk Hukum Daerah yang terpilih LAN untuk diukur	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Perangkat Daerah pemrakarsa Produk Hukum Daerah tersampling
				Evaluasi IKK	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	85	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perwali yang akan disusun atau diajukan pembahasan.	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Perda/Perwali	5	5	5	5	20	Rp10.000.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Evaluasi terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Laporan	Jumlah Laporan Akhir Evaluasi Perda	0	0	2	0	2	Rp38.400.000	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	90	Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	Menyusun dokumen kebijakan pengelolaan arsip	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan arsip yang diterbitkan	0	0	0	0	0	Rp0	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (e-office)	Instansi	Jumlah instansi yang dilakukan move implementasi Srikandi	0	35	89	0	124	Rp102.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring dan Evaluasi, serta audit pengawasan kearsipan internal dan eksternal	Dokumen	Jumlah dokumen move kearsipan internal dan eksternal	0	0	0	1	1	Rp80.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
				Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting (Aplikasi TNDE)	Instansi	Jumlah pengguna aplikasi SRIKANDI	0	0	0	137	137	Rp102.222.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah
				Menginventarisir kebutuhan layanan lain untuk diintegrasikan dengan layanan kearsipan eksisting (SIKN/JIKN terintegrasi ANRI)	orang	Jumlah pengguna layanan SIKN/JIKN	0	0	0	150	150	Rp55.000.000	Dispersip	Seluruh Perangkat Daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Pembinaan Statistik Sektoral Rabu Cantik di Perangkat Daerah Kota Surakarta	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat pembinaan statistik sektoral Rabu Cantik	0	35	0	0	35	Rp15.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Bimtek penyusunan metadata indikator, kegiatan, variabel	orang	Jumlah pengelola data yang mengikuti bimtek	0	0	60	0	60	Rp30.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Data Sektoral	orang	Jumlah pengelola data yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	65	0	0	65	Rp35.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah
				Penilaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	kegiatan	Jumlah kegiatan Lomba Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	0	0	1	1	Rp45.000.000	Diskominfo SP	Diskominfo SP
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	kegiatan	Evaluasi Penyusunan Metadata Kegiatan, Indikator, dan Variabel	kegiatan	Jumlah kegiatan evaluasi penyusunan metadata	0	0	0	1	1	Rp17.000.000
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	Nilai	Nilai Hasil Penilaian ITKP oleh LKPP	0	0	0	75	75	Rp931.400.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar LPSE (Surveilans ISO 17 Standar Layanan LPSE)	Kegiatan	Jumlah kegiatan surveilans ISO 17 Standar Layanan LPSE	0	0	0	1	1	Rp52.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
				Pemeliharaan aplikasi pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	Jumlah aplikasi pendukung pengadaan barang dan jasa yang terpelihara	0	0	0	1	1	Rp90.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Pembinaan/ sosialisasi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPBJ	Orang	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen dan PPBJ yang dibina	162	0	0	0	162	Rp150.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Clearing House	Kegiatan	Jumlah kegiatan clearing house	1	1	1	1	4	Rp54.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pendampingan eKatalog Lokal	OPD/unit penyedia	Jumlah OPD/unit penyedia yang dilakukan pendampingan eKatalog	25	25	25	25	100	Rp15.000.000	Bagian Pengadaan	Bagian Pengadaan	

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
													Barang dan Jasa Setda	Barang dan Jasa Setda
				Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	162	0	162	Rp105.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa	0	30	0	0	30	Rp105.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Asistensi Pengadaan Barang/Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang mendapat asistensi pengadaan barang/jasa	100	0	0	100	200	Rp21.600.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pelatihan Sirup	OPD/unit	Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan sirup	100	0	0	100	200	Rp25.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Review PDN Barang Jasa	OPD/unit	Jumlah OPD yang dilakukan review PDN	0	0	0	0	0	Rp20.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan reviu tata kelola PBJ	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola PBJ	0	0	0	1	1	Rp6.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Jumlah laporan rakor Monev barang dan jasa yang terlaksana	1	1	1	1	4	Rp95.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	161	161	161	161	644	Rp700.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Aset	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset	161	161	161	161	644	Rp500.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan reviu Laporan Keuangan Daerah	Laporan	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah	1	0	0	0	1	Rp90.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Melakukan reviu tata kelola BMD	Laporan	Laporan Hasil Reviu tata kelola BMD	0	0	1	0	1	Rp6.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan	161	161	161	161	644	Rp350.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP												

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				Pelaksanaan Pengelolaan Aset Sesuai aturan yang berlaku	OPD/unit	Jumlah OPD/Unit yang melaksanakan pengelolaan Aset	161	161	161	161	644	Rp600.000.000	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
				Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	Paket	Jumlah paket pemeliharaan dan pemutakhiran serta perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan Kinerja berbasis Elektronik	1	0	0	0	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
	Tingkat tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	97,5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK	Melaksanakan Kegiatan Rakorwas	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Rakorwas	1	1	1	1	4	Rp1.000.000	Inspektomat	Inspektomat
88.2: Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	327	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	Pembinaan jabatan fungsional	kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan jabatan fungsional	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Workshop untuk jabatan fungsional	kegiatan	jumlah kegiatan workshop untuk jabatan fungsional penyertaan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	evaluasi hasil tindak lanjut workshop tentang penerapan peraturan nomor 1 tahun 2023	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	mengkikuti penilaian sistem merit pada area ketiga pengembangan karir dan selama melakukan penilaian selalu melakukan monev	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi	kegiatan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				pembekalan bagi ASN menjelang purna tugas	kegiatan	jumlah kegiatan yg dilaksanakan	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				pendampingan kewirausahaan bagi ASN purna tugas	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Terselenggaranya Layanan Administrasi kepegawaian	dokumen	jumlah dokumen yang tersusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	perumusan kebijakan pengelolaan kinerja	Dokumen	jumlah laporan yang disusun	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				evaluasi penilaian kinerja	kegiatan	jumlah kegiatan evaluasi penilaian kinerja yang dilaksanakan	0	1	0	0	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	coaching dan mentoring peningkatan kinerja	dokumen	jumlah dokumen coaching dan mentoring peningkatan kinerja yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah			

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA
				uji kesehatan bagi PNS sakit	dokumen	jumlah dokumen uji kesehatan bagi PNS sakit yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				pemeriksaan tes narkoba bagi ASN	dokumen	jumlah dokumen hasil pemeriksaan tes narkoba bagi ASN yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun info faktor jabatan (bagian organisasi berkaitan dengan evaluasi jabatan)	dokumen	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang disusun	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	Bagian organisasi Setda Kota Surakarta
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan	kegiatan	jumlah FGD evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Menyusun Dokumen Rencana Suksesi untuk menduduki jabatan (talent pool)	dokumen	jumlah dokumen rencana suksesi untuk talent pool yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan ASN	Dokumen	jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	1	0	0	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SIMPEG	paket	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	0	1	1	1	3	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Pengelolaan Data Kepegawaian	laporan	jumlah laporan terkait pengolahan data kepegawaian yang terlaksana	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring an Evaluasi pelaksanaan pelatihan	dokumen	jumlah dokumen money pelatihan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	laporan	jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	0	0	3	0	3	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
				Menyusun dokumen analisis kesenjangan kompetensi	dokumen	jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi (pendidikan) yang disusun	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	penilaian mandiri sistem merit	dokumen	jumlah dokumen penilaian mandiri sistem merit yang disusun	0	0	1	0	1	Rp0	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	71	Terlaksananya Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	Melaksanakan kegiatan sosialisasi perwali kode etik	kegiatan	jumlah kegiatan sosialisasi perwali kode etik	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET 2026	OUTPUT UTAMA	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN 2026					PERANGKAT DAERAH				
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	JML ANGGARAN	KOORD	PELAKSANA		
				Sosialisasi Tim Agen Perubahan	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi agen perubahan yang dilaksanakan	0	0	0	1	1	Rp0	BKPSDM	seluruh perangkat daerah		
				Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	Laporan	Jumlah Laporan Implementasi Budaya Kerja ber-AKHLAK	1	1	1	1	4	Rp2.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah		
				Monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	0	0	1	0	1	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah		
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,72		Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	Jumlah Laporan PEKPPP	0	0	1	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
					Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	dokumen	Jumlah dokumen penetapan peta proses bisnis Pemerintah Kota Surakarta dan OPD	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
					Monitoring dan Evaluasi peta proses bisnis dan SOP	dokumen	Jumlah dokumen laporan monev peta proses bisnis dan SOP	0	1	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
					Monev penerapan Sistem Kerja	Laporan	Jumlah laporan monev penerapan Sistem Kerja	0	0	0	0	0	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,7		Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Dokumen	Jumlah laporan monev SP dan SOP	0	1	0	0	1	Rp0	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah
					Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi setiap bulan sekali	dokumen	Jumlah buku analisis aduan	1	1	1	1	4	Rp35.000.000	Diskominfo SP	Seluruh Perangkat Daerah	
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89		Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 4 kali setahun	Laporan	Jumlah Laporan SKM	0	1	0	1	2	Rp75.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan prima pada seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	Dokumen	Jumlah Laporan tinjau hasil SKM	0	1	0	1	2	Rp100.000.000	Bagian Organisasi Setda	seluruh perangkat daerah	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.11 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Kota Surakarta telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari semula 9,4% pada tahun 2021 menjadi 8,84% pada tahun 2022. Namun realisasi ini masih di bawah target RPJMD di tahun 2022, yaitu sebesar 8,25%. Capaian di tahun 2022 juga masih 72,25% dari target akhir RPJMD Tahun 2026, yaitu sebesar 6,92%	Penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran	Angka kemiskinan	7,89	7,56	7,23	6,92	kegiatan	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan pemadanan database e-sik dan data disdukcapil	0	1	0	1	2	TERKAIT	Rp0	0	1	0	1	2	TERKAIT	Rp0	0	1	0	1	2	TERKAIT	Rp0	Dinas Sosial, Disdukcapil	OPD terkait	
							bulan	Jumlah waktu verifikasi, validasi dan updating data kemiskinan	3	3	3	3	12	TERKAIT	Rp0	3	3	3	3	12	TERKAIT	Rp0	3	3	3	3	12	TERKAIT	Rp0	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
							Kegiatan	Jumlah kegiatan pengelolaan keamanan penggunaan data pada Sistem Aplikasi E-Sik	0	0	1	0	1	TERKAIT	Rp32.828.377	0	0	0	0	0	TERKAIT	Rp0	0	0	0	0	0	TERKAIT	Rp0	Diskominfo SP	Dinas Sosial	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
						Diskominfo SP memberikan rekomendasi aplikasi terkait data kemiskinan untuk dikoneksikan dengan e-sik melalui API	Kegiatan	Jumlah kegiatan integrasi aplikasi dengan E-Sik	0	0	1	0	1																	Diskominfo SP	Dinas Sosial	
						Melaporkan hasil pembahasan tingkat implementasi penggunaan data nangkis kepada wali kota dan wakil wali kota melalui nota dinas oleh sekretaris TKPKD	Dokumen	Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	0	1	0	1	2																	Bappeda dan Dinas Sosial	OPD terkait	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana					
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana				
						bimtek pokja data tentang pengelolaan data nangkis melalui e-sik	kegiatan	Jumlah pelaksanaan bimtek pokja data tentang pengelolaan data nangkis melalui e-SIK	0	0	0	1	1	TERKAIT	Rp0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	TERKAIT	Rp0	0	0	0	1	1	TERKAIT	Rp0	Dinas Sosial	OPD terkait
						Menyusun proses bisnis mekanisme kerja TKPKD	dokumen	Jumlah dokumen Proses Bisnis Mekanisme Kerja TKPKD	0	0	1	0	1	TERKAIT	Rp0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	TERKAIT	Rp0	0	0	1	0	1	TERKAIT	Rp0	Bappeda	OPD terkait
						koordinasi dan surat tertulis ke kementerian	kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan surat menyurat ke kementerian	3	3	3	3	12	TERKAIT	Rp0	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	TERKAIT	Rp0	3	3	3	3	12	TERKAIT	Rp0	Dinas Sosial	OPD terkait

*: terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koord	Pelaksana
						Audit kasus stunting	Dokumen	Jumlah kajian untuk intervensi keluarga resiko stunting	0	1	0	1	2	TERKAIT	Rp80.000.000	0	1	0	1	2	TERKAIT	Rp80.000.000	0	1	0	1	2	TERKAIT	Rp80.000.000	DP3AP2KB	DP3AP2KB	
						Rembuk stunting	kecamatan	Jumlah kecamatan yang menyepakati penganggaran penanggulangan stunting	5	5	5	5	20	TERKAIT	Rp75.000.000	5	5	5	5	20	TERKAIT	Rp75.000.000	5	5	5	5	20	TERKAIT	Rp75.000.000	DP3AP2KB	DP3AP2KB	
						pemberian tambahan protein kepada sasaran beresiko	orang	Jumlah anak resiko stunting yang menerima bantuan telur/tambahan protein	1	1	0	0	2400	TERKAIT	Rp299.100.000	1	1	0	0	2400	TERKAIT	Rp299.100.000	1	1	0	0	2400	TERKAIT	Rp299.100.000	DP3AP2KB	DP3AP2KB	
						stunting			2	2	0	0		TERKAIT		2	2	0	0		TERKAIT		2	2	0	0		TERKAIT				
						Penyediaan dapur sehat bagi beresiko stunting	kelurahan	Jumlah kelurahan yang menyediakan dapur menu sehat bagi resiko stunting	0	5	5	0	108	TERKAIT	Rp3.750.000.000	0	5	5	0	108	TERKAIT	Rp1.750.000.000	0	5	5	0	108	TERKAIT	Rp1.750.000.000	DP3AP2KB	DP3AP2KB	
									4	4				TERKAIT		4	4				TERKAIT		4	4			TERKAIT					

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koord	Pelaksana
										Pendataan CatinCalon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan CatinCalon PUS dengan Pemeriksaank esehatan.	Laporan	Jumlah laporan pemeriksaan Catin wanita (tiga) bulan sebelum menikah.	1	1			1	1	4	TERKAIT	Rp0			1	1	1	1	4			TERKAIT	Rp0
							Laporan	Jumlah laporan Catin wanita yang terdeteksi anemia.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk	
							Laporan	Jumlah data Catin wanita yang terdeteksi kekurangan gizi	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koord	Pelaksana
										Pendataan ibu hamil.	Laporan	Jumlah laporan ibu hamil	1	1			1	1	4	TERKAIT	Rp0			1	1	1	1	4			TERKAIT	Rp0
							Laporan	Jumlah laporan Ibu hamil dengan 4 (empat) Terlalu (Terlalu Muda ≤ 19 tahun; Terlalu Tua > 35 tahun; Terlalu Dekat < 24 bulan; Terlalu banyak > 2 anak).	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk	
							Laporan	Jumlah laporan ibu hamil dengan anemia.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koord	Pelaksana
										Laporan	Jumlah laporan anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan MPASI.	1	0	1			0	2	TERKAIT	Rp0	1			0	1	0	2	TERKAIT			Rp0	1
						Laporan	Jumlah data anak usia 0-12 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk		
						Pendataan dan penapisan anak usia 0-59 bulan.	Laporan	Jumlah data anak usia 0-59 bulan.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	0	0	0	0	0	TERKAIT	Rp0	0	0	0	0	0	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk	
						Laporan	Jumlah data anak usia 0-59 bulan dengan gizi kurang.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koord	Pelaksana
										Laporan	Jumlah data anak usia 0-59 bulan dengan gizi buruk.	1	1	1			1	4	TERKAIT	Rp0	1			1	1	1	4	TERKAIT			Rp0	1
						Laporan	Jumlah data anak usia 0-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk		
						Laporan	Jumlah data anak usia 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DKK	DKK + Pusk		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target				Rencana Aksi	Output		Target 2024					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2025					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Target 2026					Jenis Keg Aksi	Jml Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koord	Pelaksana
										Data	Jumlah data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	1	1	1			1	4	TERKAIT	Rp0	1			1	1	1	4	TERKAIT			Rp0	1
						Data	Jumlah data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan pangan non-tunai.	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DINSOS	OPD terkait		
						Data	Jumlah data PUS prasejahtera yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI).	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	1	1	1	1	4	TERKAIT	Rp0	DINSOS	OPD terkait		

